

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Sikap dan Perilaku

Teori Sikap dan Perilaku dikembangkan oleh Triandis (1980). Menurut Triandis (1980) bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan sosial, kebiasaan, dan konsekuensi yang ada. Sikap adalah berkenaan dengan apa yang orang-orang ingin lakukan, aturan sosial merupakan apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan, dan kebiasaan adalah berkaitan dengan apa yang mereka biasa lakukan. Konsekuensi merupakan akibat-akibat dari perilaku yang mereka pikirkan, baik konsekuensi yang menguntungkan maupun konsekuensi yang merugikan.

Dalam konteks pemerintah daerah sikap atau perilaku yang dimaksudkan yaitu bagaimana suatu individu menanggapi aturan perubahan standar yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Sikap dari individu bisa berbagai macam, ada yang siap dengan perubahan standar, dan ada juga yang belum siap dengan perubahan. Dapat kita cermati bahwa kesiapan aparatur dalam menyusun laporan tidak terlepas dari kebiasaan dari aparturnya. Kebiasaan disini dapat diartikan seberapa besar kesiapan aparatur pemerintah dalam menerima perubahan standar yang ada. Apabila aparatur dalam menerima perubahan standar yang ada bisa cepat menerima dan menerapkan standar dalam penyusunan laporan

keuangan dan sesuai aturan pelaporan maka bisa dikatakan aparatur pemerintah siap dalam menerima SAP berbasis akrual.

2. Teori Budaya Organisasi

Setiap individu pasti menginginkan perubahan yang memberikan dampak kearah yang lebih baik. Tidak bisa dipungkiri lagi perubahan merupakan suatu proses dimana perbaikan suatu individu atau organisasi menuju kearah peningkatan kualitas yang dihasilkan. Bliss dalam Koesmono (2006) mengatakan bahwa di dalam budaya terdapat kesepakatan yang mengacu pada suatu sistem makna secara bersama, dianut oleh anggota organisasi dalam membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya.

Glaser,et.al (1987); Budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama. Pola-pola dari kepercayaan, symbol-simbol, ritual-ritual dan mitos-mitos yang berkembang dari waktu ke waktu dan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan organisasi. Beraneka ragam bentuk organisasi atau perusahaan, tentunya budaya yang berbeda-beda hal ini tentu wajar karena lingkungan organisasinya berbeda-beda. Pada pemerintahan di Indonesia, reformasi perubahan pengelolaan keuangan Negara/daerah mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah (Faradillah, 2013). Perubahan SAP yang sebelumnya berbasis kas menuju SAP berbasis akrual yang tersirat dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010

merupakan langkah perubahan standar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

3. Sistem Akuntansi Basis Akrual.

Seperti yang telah disimpulkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tahun 2006, akuntansi basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut. Halim dan Kusufi dalam Faradillah (2013) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan

Menurut Guthrie dalam Setyaningsih (2013) definisi sistem akuntansi akrual adalah suatu pencatatan transaksi atas peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan periode terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut. Sedangkan *single entry* metode kas basis, pencatatan dan pengakuan transaksi, peristiwa serta kinerja aktifitas pemerintah berdasarkan substansi operasional daripada fokus dengan waktu yang tidak jelas kapan dan berapa penerimaan dan pembelanjaan kas yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut banyak pimpinan sektor publik, angka-angka informasi yang terdapat pada laporan LKPD berbasis akrual lebih informatif. Selain

itu alokasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kualitas dari LKPD itu sendiri lebih akuntabel.

4. Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan PP No. 24 tahun 2005 pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan dan penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

5. Pendidikan Formal

Secara bahasa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Muzahid, 2014). Pendidikan sangat erat dengan sejauh mana seseorang memahami perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, sosia, sampai kepada perkembangan keyakinan. Dengan pendidikan yang memadai tentu aparatur di bagian akuntansi/ keuangan akan lebih mudah mengerti dan memahami pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di Instansi pemerintahan

6. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Penggunaan basis akrual sudah menjadi tren di berbagai negara saat ini, hal tersebut terkait dengan manfaat dari penggunaan model akuntansi berbasis akrual. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern di sektor publik saat ini yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas (Mulyana, 2009). Untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tentu agar sesuai dengan

batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka diperlukan strategi dan rencana kerja.

Diperlukan rencana dan strategi dalam untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada dengan batas waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Strategi Penerapan SAP Akrual

Tahun	Strategi Kegiatan
2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual 2. Mengembangkan framework Akuntansi berbasis akrual 3. Sosialisasi SAP berbasis Akrual
2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi 2. Pengembangan system akuntansi dan TI di bagian pertama (proses bisnis dan requirement) 3. Pengembangan kapasitas SDM
2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem Akuntansi dan TI (Lanjutan) 2. Pengembangan kapasitas SDM
2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Piloting beberapa KL dan BUN 2. Revisi, Evaluasi dan penyempurnaan sistem 3. Pengembangan kapasitas SDM (Lanjutan)
2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parallel run dan konsolidasi seluruh LK 2. Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem 3. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Penuh 2. Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)

Sumber : KSAP (2011)

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengalaman terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Penerapan sistem akuntansi basis akrual dilakukan secara bertahap. Sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, setiap entitas pemerintah daerah harus menerapkan atandar akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya lima tahun.

Aparatur dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang telah dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan lebih siap dalam menerapkan standar akuntansi dengan akrual basis murni, yaitu pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sebelumnya dengan kas basis sekarang dilakukan dengan akrual basis.

Menurut setyaningsih (2013), sebanyak 90 % anggota dewan kurang berpengalaman tentang akuntansi pemerintahan. Berdasarkan penelitian tersebut pengalaman merupakan salah satu indikasi siap tidaknya aparatur pemerintah dalam implementasi SAP berbasis akrual. Maka hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Pengalaman berpengaruh positif terhadap kesiapan aparatur dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

2. Komitmen terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Komitmen terhadap suatu kelompok atau organisasi merupakan suatu perilaku atau dimensi watak seseorang yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kekuatan para karyawan dalam menerima setiap aturan perubahan yang ada. Menurut ikhsan (2007), komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik dan partisipasi anggaran membuka peluang bagi bawahan untuk menciptakan kinerja yang baik jika komitmen karyawan terhadap organisasi berada pada tingkat yang tinggi.

Penelitian senada juga dilakukan oleh Sumarno dalam Al Azhar,et. al (2009) menyimpulkan pengaruh komitmen organisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah positif signifikan

Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Tim Penelitian Kemendagri dalam Setiawati (2013) bahwa Pemda pada prinsipnya siap dan berkomitmen dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesa ini, diungkapkan oleh Sulani dalam Pandey (2014) yang menyebutkan komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP No.24 tahun 2005.

Pada konteks Pemerintah daerah, karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi akan berusaha untuk cepat memahami perubahan

SAP berbasis akrual. Diharapkan dengan komitmen yang tinggi akan berdampak pada kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual berbas. Maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H₂ : Komitmen berpengaruh positif terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

3. Teknologi Informasi terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Dalam PP No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dinyatakan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Berdasarkan PP No 56/2005 dijelaskan pentingnya penguasaan teknologi informasi harus dimiliki oleh aparatur pemerintah dalam mempersiapkan pergantian aturan dalam menyusun laporan keuangan yang menuntut efisiensi dan efektifitas.

Penguasaan teknologi yang juga didukung dengan ketersediaan perangkat pendukung yang membantu aparatur pemda dalam melaksanakan tugas seperti ketersediaan komputer maupun perangkat lunak dan sistem database yang terintegrasi oleh sistem pusat yang memungkinkan adanya sinkronisasi antar sistem. Pemanfaatan teknologi akan sangat membantu aparatur pemerintah dalam mempersiapkan penerapan standar pengelolaan keuangan yang sebelumnya menggunakan kas basis modifikasi menjadi full akrual basis.

Sejalan dengan Andriani (2010) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada tingkat ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas diduga terdapat hubungan positif penguasaan teknologi informasi terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP basis akrual. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pada penelitian ini yaitu :

H₃ : Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

4. Latar belakang Pendidikan terhadap kesiapan aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Latar belakang pendidikan sebagai salah satu tolak ukur baik buruknya kualitas aparatur pemerintah dalam penyusunan LKPD. Apabila pengelola keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di

bidang keuangan, atau minimal pernah mengikuti *training* atau pelatihan mengenai penyusunan anggaran, atau salah satu pihak yang menjalankan siklus perencanaan memiliki pemahaman yang memadai dalam hal perencanaan atau penyusunan laporan keuangan, maka yang terjadi yaitu pengelola akan kesulitan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual. .

Pada penelitian Fadliah dalam Ayuningtyas (2013) tentang pengaruh pendidikan terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi, menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas penyajian informasi akuntansi

Kondisi diatas senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BPK, Nazier (2009) yang menunjukkan bahwa 76,77 % untuk pengelola keuangan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian hipotesis pada penelitian ini adalah

H₄ : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap aparatur pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

